

PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD*

Aprila Firlis Damayanti

Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

firli03bg1@gmail.com

Anita Primastiwi

Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

anita.primas@ustjogja.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of internal control, good corporate governance, and performance measurement system on fraud prevention in government agencies of the Special Region of Yogyakarta. The method used in this research a quantitative method in the form of primary data using a questionnaire. The sampling technique used was the purposive sampling method. The population in this study were permanent employees and non-permanent employees in the Special Region of Yogyakarta with a sample size of 80 respondents. Data collection is done by giving questionnaires directly to respondents via a google form. The data in this study were tested using the Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20. The results of this study indicate that internal control does not affect and fraud prevention, while good corporate governance and performance measurement system have a positive effect on fraud prevention.

Keywords: *Internal Control, Good Corporate Governance, Performance Measurement System, Fraud Prevention*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan sistem pengukuran kinerja terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif berupa data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sampel 80 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner langsung kepada responden melalui google form. Data dalam penelitian ini diuji menggunakan Software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud, sedangkan good corporate governance dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Kata Kunci: *Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, Sistem Pengukuran Kinerja, Pencegahan Fraud*

1. PENDAHULUAN

Semua organisasi apapun jenisnya, dalam hal operasional memiliki risiko terjadinya kecurangan atau *fraud*. Tjahjono, (2013) menyatakan bahwa *fraud* secara umum merupakan tindakan illegal yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui pihak lain yang akan menyebabkan kerugian dan pelaku kecurangan mendapat keuntungan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan mengenai tindakan illegal, kesengajaan, keuntungan yang akan merugikan orang lain. Tuanakotta, (2007) menyatakan bahwa kerangka kerja *fraud* dalam bentuk *fraud tree* memiliki tiga cabang yaitu korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan pada laporan keuangan. Korupsi dalam kategori tersebut termasuk penyuapan, pertentangan, dan pemerasan. Pada penyalahgunaan aset tergolong dalam kecurangan atas persediaan aset lain, kecurangan pada kas, dan pengeluaran biaya yang tidak wajar.

Pada lingkup akuntansi, konsep kecurangan merupakan suatu entitas yang harus diterapkan melalui penyimpangan dari prosedur akuntansi. Penyimpangan tersebut akan berdampak buruk pada penyajian laporan keuangan yang ada di suatu perusahaan. *Statement of Auditing Standart* dalam Norbarani, (2012) menyatakan bahwa *fraud* sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material tersebut dapat merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang didapatkan tidak mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Pada lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan

merupakan alat komunikasi dengan masyarakat.

Masyarakat dapat mengetahui kinerja yang ada dipemerintahan melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya serta dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya (Najahningrum, 2013). Instansi pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pemeritahan. Mengenai tujuan pemerintah tersebut didukung dengan melakukan tindakan yang baik dari seluruh pegawai. Namun, pada kondisi sebenarnya masih banyak terdapat kasus kecurangan yang terjadi di sektor swasta maupun di sektor publik yaitu pemerintahan. Salah satu kasus yang dikatakan sebagai tindakan *fraud* yaitu korupsi (Luh, 2018).

Fenomena kecurangan seperti korupsi telah menyebar hampir disebagian besar di negara di dunia. Kasus korupsi ini biasanya terlibat pada beberapa orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan tinggi. Namun, tidak hanya itu kasus korupsi ini juga sering terjadi pada level bawah (Aksa, 2018). Menurut (ICW, 2017), dalam jangka waktu 6 bulan (1 Januari sampai 30 Juni 2017) tercatat ada 226 kasus korupsi yang terjadi Indonesia.

Hasil survey data dari *infokorupsi.com* terdapat beberapa kasus korupsi yang terjadi di Yogyakarta. Kasus tersebut antara lain kasus yang terjadi di Provinsi DIY yaitu di Bantul, Sleman, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Kasus yang terjadi di Provinsi DIY antara lain kasus korupsi dana rekonstruksi pasca gempa senilai Rp 6,4 miliar dan yang terbaru kasus bus trans jogja yang ditaksir merugikan negara senilai Rp

12,5 miliar (BPK, 2013). Kasus yang terjadi di Bantul antara lain kasus pengadaan buku ajar senilai Rp 250 juta, kasus pembelian Bantul radio senilai 1,7 miliar dan kasus penjualan tanah kas Desa Bangunharjo senilai Rp 8 miliar (Infokorupsi, 2011). Kasus korupsi yang terjadi di Sleman adalah kasus korupsi hibah KONI Sleman senilai Rp 1 miliar dan korupsi buku ajar senilai Rp 12,1 miliar (Tempo.co, 2013). Kasus korupsi yang terjadi di Kulonprogo adalah kasus korupsi APBD senilai Rp 12,1 miliar. Sementara kasus korupsi yang terjadi di Gunungkidul adalah kasus korupsi dana tunjangan anggota DPR dan kasus duplikasi anggaran asuransi PNS masing-masing sebesar Rp 2,8 miliar dan Rp 1,7 miliar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan antara pemilik (*principal*) dan agen sebagai pelaku utama yang berdasarkan kontrak pada suatu perusahaan (Meckling, 1976) dalam (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Teori agensi ini dapat digunakan untuk memahami isu pengaruh *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan. Teori ini berasumsi bahwa setiap individu lebih mengutamakan kepentingan sendiri sehingga dapat menyebabkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Namun, dengan adanya konflik kepentingan dan kondisi tidak seimbang, maka informasi yang terjadi antara *principal* dengan *agent* akan menyebabkan biaya keagenan yang ditanggung oleh perusahaan.

Menurut (Eisenhardt, 1989) teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat manusia yaitu: manusia lebih mementingkan diri sendiri (*self interest*),

manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*) dan manusia menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan beberapa asumsi tersebut manajer akan bertindak *opportunistic* yaitu mengutamakan kepentingan pribadi. Permasalahan keagenan yang terjadi di suatu perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG). *Good corporate governance* dalam hal ini berperan penting pada pengelolaan perusahaan yang harus diawasi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut telah mematuhi berbagai peraturan yang telah berlaku.

2.2 Teori Institusional

Teori institusional atau teori kelembagaan yaitu penjelasan populer dan kuat untuk tindakan individu dan organisasi (Dacin, Goodstein, 2002). Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa organisasi layak untuk didukung (Ridha, 2012). Teori institusional memaknai keberadaan organisasi dipengaruhi oleh tekanan normatif yang timbul dari lingkungan eksternal, namun bisa juga timbul dari lingkungan internal yaitu di organisasi itu sendiri (Sofyani & Akbar, 2013).

Banyak tindakan di organisasi mencerminkan suatu pola dalam melakukan hal-hal yang berkembang dari waktu ke waktu dan telah disahkan pada organisasi dan lingkungan (Prefer 1982). Kaitannya dengan pelaksanaan sistem pengukuran kinerja di sektor pemerintahan yaitu kemungkinan dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat tujuan organisasi, dalam hal ini pencapaian

kinerja, yang distimulus dengan berlakunya sistem pengukuran kinerja.

2.3 Teori *Fraud Triangle*

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *fraud triangle theory* yang merupakan suatu konsep yang dikemukakan oleh Cressey mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan yang dimana faktor-faktor tersebut dikenal dengan istilah *fraud triangle*. Teori *fraud triangle* ini membahas mengenai 3 elemen yang mendasari terjadinya kecurangan pelaporan keuangan yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi dari pelaku kecurangan (Sihombing & Rahardjo, 2014).

2.4 Pengendalian Internal

Sedangkan menurut Krismiaji, (2002) pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Menurut kerangka kerja COSO, (2013) pengendalian internal memiliki lima komponen pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian (*control and environment*).
2. Penilaian risiko (*risk assessment*)
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

2.5 *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, (2006) *good corporate governance* adalah

suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Ketika suatu perusahaan bangkrut secara tiba-tiba, maka terdapat kecurigaan bahwa pengendalian internal pada perusahaan tersebut tidak efektif dan pengelolaan risiko yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan *corporate governance* merupakan bagian dari strategi pengelolaan risiko untuk perusahaan pada umumnya. *Corporate governance* yang efektif akan menyebabkan *fraud* pada suatu perusahaan atau organisasi tidak akan terjadi.

2.6 Sistem Pengukuran Kinerja

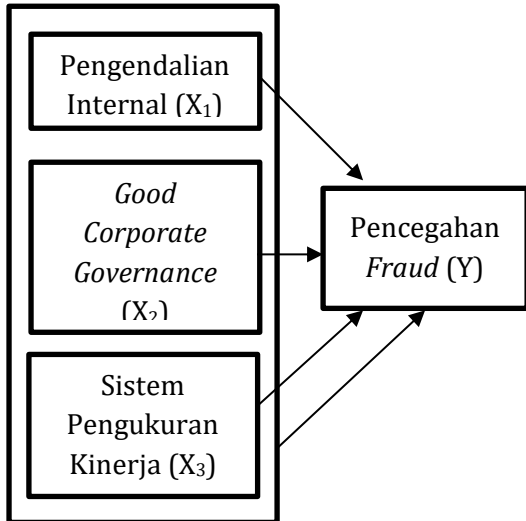
Pengukuran kinerja merupakan suatu tolok ukur bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, apakah kinerja perusahaan sudah baik atau belum dari segi keuangan maupun non keuangan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kinerja operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, melalui pengukuran kinerja perusahaan juga dapat memilih strategi yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dikatakan sudah baik jika perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki serta mampu untuk mencapai target yang telah direncanakan (Citrawati & Isgiyarta, 2013).

2.7 Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* yaitu aktivitas yang dilakukan mengenai penetapan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu tindakan yang telah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan pihak lain diperusahaan untuk memberikan keyakinan dalam tercapainya tujuan organisasi yaitu

efektifitas dan efisien operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Committee of Sponsoring Organizations & (COSO), 1992).

2.8 Kerangka Pemikiran



Sumber: Olah Data Penulis (2021)

- H₁: Pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*
- H₂: *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*
- H₃: Sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*

H₄: Pengendalian internal, *good corporate governance*, dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini berdasarkan asumsi, kemudian ditentukan variabelnya, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode-metode yang valid. Metode kuantitatif didukung dengan

memperoleh data yang didapat dari penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif.

Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

3.1 Pengendalian Internal

Berikut ini merupakan tabel definisi operasional dan indikator variabel pengendalian internal (X₁) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Pengendalian Internal

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pengendalian Internal (X ₁)	Proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam entitas untuk menyediakan jaminan yang mengarahkan tercapainya tujuan berhubungan dengan operasional dan kepatuhan (COSO, 2013).	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Control environment</i> 2. <i>Risk assessment</i> 3. <i>Control activity</i> 4. <i>Communication and information</i> 5. <i>Monitoring activity</i> 	Likert

3.2 Good Corporate Governance

Berikut ini merupakan tabel definisi operasional dan indikator variabel *good corporate governance* (X₂) sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Good Corporate Governance

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Pencegahan <i>fraud</i> adalah upaya terintegrasi yang dapat menyebabkan terjadinya <i>fraud</i> (Pusdiklatwas, 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan anti <i>fraud</i> 2. Komitmen melaksanakan kebijakan anti <i>fraud</i> 3. Prosedur pencegahan baku 4. Pemisahan fungsi 5. Media pendukung operasional 6. Rapat atau evaluasi secara berkala 	Likert

3.3 Sistem Pengukuran Kinerja

Berikut ini merupakan tabel definisi operasional dan indikator variabel sistem pengukuran kinerja (X_3) sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Sistem Pengukuran Kinerja

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Sistem Pengukuran Kinerja (X_3)	Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses pengkuantifikasian efisiensi dan efektivitas dari tindakan yang lalu (Neely, 2002).	1. Penerapan sistem pengukuran kinerja 2. Tekanan eksternal (Akbar, 2013)	Likert

3.4 Pencegahan *Fraud*

Berikut ini merupakan tabel definisi operasional dan indikator variabel sistem pencegahan *fraud* (Y) sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Pencegahan *Fraud*

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
<i>Good Corporate Governance</i> (X_2)	Peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001).	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Tanggungjawab 4. Independen 5. Kewajaran 6. Kesetaraan	Likert

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

a. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	80	53	75	62,09	4,267
<i>Good Corporate Governance</i> Sistem Pengukuran Kinerja Pencegahan <i>Fraud</i>	80	22	30	25,11	2,062
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan dari tabel 4.1 diatas, hasil uji statistik deskriptif dapat disimpulkan pada masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel pengendalian internal memiliki nilai minimum 53, maximum 75, mean 62,09 dan standar deviasi sebesar 4,267.
2. Variabel *good corporate governance* memiliki nilai minimum 22, maximum 30, mean 25,11 dan standar deviasi sebesar 2,062.
3. Variabel sistem pengukuran kinerja memiliki nilai minimum 32, maximum 60, mean 46,64 dan standar deviasi sebesar 4,128.
4. Variabel pencegahan *fraud* memiliki nilai minimum 45, maximum 68, mean 57,48 dan standar deviasi sebesar 4,115.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
N		80
Normal Parameters ^{ab}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,82200025
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,126
	Negative	-,076
Kolmogorov-Smirnov Z		1,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,156
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,156 yang berarti lebih besar dari 0,05.

2) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengendalian Internal	,542	1,844
<i>Good Corporate Governance</i>	,477	2,098
Sistem Pengukuran Kinerja	,839	1,192
a. Dependent Variable: Pencegahan <i>Fraud</i>		

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut, maka data tersebut dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai *tolerance* untuk variabel pengendalian internal sebesar $0,542 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,844 < 10$, variabel *good corporate governance* memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,477 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $2,098 < 10$, variabel sistem pengukuran kinerja memiliki nilai *tolerance* sebesar $0,839$ dan nilai VIF sebesar $1,192 < 10$.

3) Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.	
					B
(Constant)	8,202	28,817		,285	,777
Pengendalian Internal (X_1)	-,285	,537	-,082	-,531	,597
<i>Good Corporate Governance</i> (X_2)	,960	1,186	,134	,810	,421
Sistem Pengukuran Kinerja (X_3)	-,145	,446	-,040	-,324	,747
a. Dependent Variable: ABRESID					

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji heteroskedastisitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan bahwa model regresi yang diperoleh terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Hipotesis

1) Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,851	5,525		2,507	,014
Pengendalian Internal	,085	,103	,088	,824	,413
Good Corporate Governance	,514	,227	,258	2,261	,027
Sistem Pengukuran Kinerja	,546	,086	,547	6,375	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.5, persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 13,851 + 0,085X_1 + 0,514X_2 + 0,546X_3 + e$$

Penjabaran persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai α sebesar 13,851, artinya tidak terjadi perubahan pada variabel independen pengendalian internal, *good corporate governance*, dan sistem pengukuran kinerja maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut bernilai 0 atau konstan.
2. Nilai koefisien pengendalian internal (X_1) yaitu sebesar 0,085 dan bertanda positif, artinya jika variabel pengendalian internal (X_1)

meningkat satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) meningkat sebesar 0,085.

3. Nilai koefisien *good corporate governance* (X_2) yaitu sebesar 0,514 dan bertanda positif, artinya jika variabel *good corporate governance* (X_2) meningkat satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) meningkat sebesar 0,514.
4. Nilai koefisien sistem pengukuran kinerja (X_3) yaitu sebesar 0,546 dan bertanda positif, artinya jika variabel sistem pengukuran kinerja (X_3) meningkat satu satuan, maka pencegahan *fraud* (Y) meningkat sebesar 0,546.

2) Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan (uji F) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	708,819	3	236,273	28,542	,000 ^b
Residual	629,131	76	8,278		
Total	1337,950	79			

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengukuran Kinerja, Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai f-hitung > f-tabel dalam penelitian ini yaitu 28,542 > 2,72 dan nilai signifikannya 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian internal, *good corporate governance*, dan sistem pengukuran

kinerja secara simultan berpengaruh terhadap variabel pencegahan terjadinya *fraud*.

3) Hasil Uji Persial (Uji t)

Hasil uji persial (uji t) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Persial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13,851	5,525		2,507	,014
Pengendalian Internal	,085	,103	,088	,824	,413
Good Corporate Governance	,514	,227	,258	2,261	,027
Sistem Pengukuran Kinerja	,546	,086	,547	6,375	,000

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Nilai t-hitung variabel pengendalian internal sebesar 0,824 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,66515 dan nilai probabilitas signifikan sebesar $0,413 \geq 0,05$, nilai koefisien (B) sebesar 0,085 bertanda positif yang artinya jika variabel pengendalian internal (X_1) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel pencegahan *fraud* (Y) meningkat sebesar 0,085. Jika dilihat dari nilai koefisien (B) besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* tidak signifikan dengan arah positif. Berdasarkan analisis tersebut dapat

disimpulkan bahwa H_1 tidak terdukung yang artinya pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud* tidak terdukung.

2. Nilai t-hitung variabel *good corporate governance* sebesar 2,261 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,66515 dan nilai probabilitas signifikan sebesar $0,027 \leq 0,05$, nilai koefisien regresi sebesar 0,514 bertanda positif yang artinya jika variabel *good corporate governance* (X_2) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel pencegahan *fraud* (Y) meningkat sebesar 0,514. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan H_2 didukung yang artinya terbukti bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.
3. Nilai t-hitung variabel sistem pengukuran kinerja sebesar 6,375 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,66515 dan nilai probabilitas signifikan sebesar $0,000 \leq 0,05$, nilai koefisien regresi sebesar 0,546 bertanda positif yang artinya jika variabel sistem pengukuran kinerja (X_3) meningkat sebesar satu satuan, maka variabel pencegahan *fraud* (Y) meningkat sebesar 0,546. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan H_3 didukung yang artinya terbukti bahwa sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

4) Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,728 ^a	,530	,511	2,877
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengukuran Kinerja, Pengendalian Internal, <i>Good Corporate Governance</i>				
b. Dependent Variable: Pencegahan <i>Fraud</i>				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,511, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 51,1% dan sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan pada sisi pengendalian internal terkait lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta monitoring pada instansi pemerintah sudah berjalan sangat efektif. Pada indikator yang diteliti dapat dilihat dari jawaban responden membuktikan bahwa instansi pemerintah sudah memiliki peraturan tertulis mengenai standar operasional prosedur sehingga para pegawai dapat menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai SOP. Selain itu, instansi pemerintah juga telah menjalankan pemisahan tugas dan wewenang dalam fungsi organisasi serta memiliki sistem keamanan data terutama data keuangan dengan menggunakan *password* untuk

mengakses agar keamanan data dapat terjamin.

Sedangkan pada sisi pencegahan *fraud*, dapat dilihat dari jawaban responden yang mengakui bahwa beberapa instansi pemerintah DIY belum memiliki peraturan tertulis terkait program anti kecurangan. Namun, sebaik apapun sistem pengendalian internal yang telah dijalankan maka tidak terlepas dari pengaruh sikap, cara berfikir, dan tindakan setiap individu yang berada di organisasi tersebut (Kusumastuti, 2012). Menurut KPMG dalam (Goal, 2014), menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan penyebab tertinggi terjadinya *fraud*. Salah satu risiko yang dihadapi oleh pemerintahan karena kegagalan dalam menerapkan pengendalian internal tidak efektif, maka kecurangan akan mudah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

b. Pengaruh *Good Corporate Governnace* terhadap Pencegahan *Fraud*

Pada prinsip akuntabilitas dapat dilihat bahwa dengan adanya prosedur yang telah dijalankan oleh seluruh pegawai maka, tidak ada akses bagi para pelaku untuk melakukan kecurangan. Berdasarkan dari segi prinsip responibilitas, seluruh pegawai telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan yang berlaku. Sedangkan dari segi prinsip *fairness*, hubungan kerja dilakukan dengan adil dan wajar kepada seluruh pegawai. Hasil penelitian hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa *good corporate*

governance berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

c. Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Pencegahan Fraud

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi sistem pengukuran kinerja, maka semakin tinggi pula upaya pencegahan terjadinya *fraud*. Tanpa adanya kesadaran dan komitmen dalam mencegah *fraud*, maka akan berdampak pada kurang baiknya kinerja pemerintah (Havid Sularso, 2015).

Menurut (Arfah, 2011) menyatakan bahwa tingginya praktik kecurangan yang terjadi pada institusi publik maupun privat, dari yang sederhana sampai rumit, seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara konsisten dan meluas karena tanpa adanya kesadaran dan komitmen maka akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2016) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

d. Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Pencegahan Fraud

Menurut KPMG dalam (Goal, 2014), menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal merupakan penyebab tertinggi terjadinya *fraud*. Salah satu resiko yang dihadapi oleh pemerintahan karena kegagalan dalam

menerapkan pengendalian internal tidak efektif, maka kecurangan akan mudah terjadi sehingga berdampak buruk pada kinerja. Selain itu, pengendalian internal merupakan proses untuk menilai kinerja dengan memperhatikan kepuasan karyawan dalam bekerja dengan maksimal dan mengurangi ketidakpuasaan karyawan yang nantinya akan menimbulkan penyimpangan seperti penipuan, salah saji laporan keuangan, dan memanipulasi keuangan sebagai bentuk kecurangan.

Menurut (Chapple, 2009) dan (Agarwal, 2011) menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang baik akan mengurangi resiko penyalahgunaan aset atau pencegahan *fraud*. Hal ini berarti pelaksanaan *good corporate governance* mampu mencegah terjadinya kecurangan, karena berkaitan dengan sifat keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas dan adanya kontrol dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengendalian internal, *good corporate governance*, dan sistem pengukuran kinerja berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*
2. *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.
3. Sistem pengukuran kinerja berpengaruh positif terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.
4. Secara keseluruhan pengendalian internal, *good corporate governance*, dan sistem pengukuran kinerja

berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

5.2 Saran

1. Bagi instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan untuk memberikan sanksi yang tegas untuk semua jajaran pegawai baik itu atasan maupun bawahan yang telah melakukan pelanggaran seperti pemotongan upah gaji.
2. Bagi instansi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan untuk melakukan perputaran rotasi pegawai setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir tindakan terjadinya *fraud* (kecurangan).
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah metode pengumpulan data berupa wawancara agar responden dapat memberikan informasi sesuai dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya sehingga lebih akurat dan terpercaya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperbanyak jumlah sampel, sehingga akan mendapatkan hasil yang signifikan dan lebih mendekati pada keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (FCGI), F. for C. G. in I. (2001). *Seri Tata Kelola (Corporate Governance)* (Jilid 2). <http://fcgi.org.id>.
- Akbar, R. (2013). the Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure Towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(1), 62–83.
<https://doi.org/10.22146/jieb.6230>
- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.
- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Investasi*, 7(2), 137–153.
- BPK. (2013). *Dugaan Korupsi Trans Jogja, BPK: Ada Indikasi Kerugian Negara*. <https://yogyakarta.bpk.go.id/dugaan-korupsi-trans-jogja-bpk-ada-indikasi-kerugian-negara/>
- Chapple, L., Ferguson, C., & Kang, D. (2009). Corporate Governance and Misappropriation. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 1(2).
- Citrawati, M., & Dr. Jaka Isgiyarta, Msi, A. (2013). Analisis Penilaian Kinerja Perusahaan Yang Diukur Dengan Konsep Balanced Scorecard (Studi Kasus Pada Pt. Pura Barutama Kudus Unit Offset). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2.
- Committee of Sponsoring Organizations, & (COSO), T. C. (1992). *Internal Control Integrated Framework*. AICPA Publication.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework: Executive SUMMARY*. AIGPA' s Publication Devision.
- Eisenhardt. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. (2006).
- GK Agarwal, Y. M. (2011). Good governance a tool to prevent corporate fraud. *International Journal of Commerce, Bussines and Management*, 2(6), 318–327.
- Goal, V. M. L. (2014). *Pengaruh peran*

- auditor internal dan pengendalian intern terhadap kinerja perusahaan melalui pencegahan kecurangan pada perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Universitas Sumatera Utara.*
- Infokorupsi. (2011). *Kasus Dugaan Korupsi Bantul, Penggalangan Hak Interpelasi Berlanjut*. <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9686&l=kasusdugaan-korupsi-bantul-penggalangan-hak-interpelasi-berlanjut>
- Krismiaji. (2002). *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP AMP YKPN.
- KUSUMASTUTI, N. R. (2012). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI DENGAN PERILAKU TIDAK ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*.
- Luh, N., Indah, P., Dewi, T., Anggariyani, M. P., Eka, I. D. A., Made, N., Gayatri, S., Sudiari, K. D., & Andika, K. D. (2018). *FRAUD TRIANGLE DI SEKTOR PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Buleleng)*. 8(2), 157-162.
- M. TINA DACIN, JERRY GOODSTEIN, W. R. S. (2002). *INSTITUTIONAL THEORY AND INSTITUTIONAL CHANGE: INTRODUCTION TO THE SPECIAL RESEARCH FORUM*. *Academy of Management Journal*, 45-46.
- Meckling, J. &. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305-360.*
- Najahningrum, A. F. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) : Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*. *Lib.Unes.Ac.Id*, 1-224. <https://lib.unnes.ac.id/18049/>
- Neely. (2002). *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*. Prentice Hall.
- Norbarani, L. (2012). *Analisis Fraud Triangle yang Diadopsi dalam SAS No. 99*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(99), 1-35.
- Pratiwi, F. S. (2016). *Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dan dampaknya pada kinerja perusahaan*.
- Pusdiklatwas, B. (2008). *Etika dalam FRAUD AUDIT* (5th ed.).
- Ridha, A. dan B. (2012). *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan*.
- Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. N. (2014). *Pengaruh Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud (Studi Empiris pada Perusahaan Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2016)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1-12.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). *Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184-205. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10>
- Tempo.co. (2013). *Gelapkan Rp 1 M, Bekas Ketua KONI Dituntut Penjara*. <https://nasional.tempo.co/read/511713/gelapkan-rp-1-m-bekas-ketua-koni-dituntut-penjara/full&view=ok>
- Tjahjono, S. dkk. (2013). *Business Crimes*

*and Ethics : Konsep dan Studi Kasus
FRAUD di Indonesia dan Global (1st
ed.). Andi.*

Tuanakotta, M. T. (2007). *Akuntansi
Forensik dan Audit Investigatif (2nd
ed.)*. Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.

Watch/ICW, I. C. (2017). *Dalam kurun
waktu 6 bulan (1 Januari-30 Juni
2017) mencatat ada 226 kasus
korupsi*. <http://news.detik.com>.